

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. (PERSERO) ASURANSI
KESEHATAN INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN CABANG 13-10 JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh
Asa's

Hadiah

Klass

~~ambellan~~

336-29

Terima T : 30 SEP 2002

TAS

No. Induk

KLASIR / E YAS

Idan

P

C. /

Luki Yaswati

NIM. 990903101013

Dosen Pembimbing

Drs. MATNUR HARYONO

NIP. 130 531 992

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

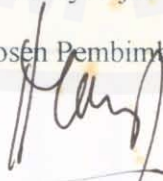
Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

N a m a : LUKI YASWATI
N I M. : 990903101013
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
**J u d u l : PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI
TETAP PADA PT. (PERSERO) ASURANSI
KESEHATAN INDONESIA KANTOR
PERWAKILAN CABANG 13-10 JEMBER**

Jember, 20 Juni 2002

Menyetujui :

Dosen Pembimbing,



Drs. MATNUR HARYONO

NIP. 130 531 992

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Nama : LUKI YASWATI
N I M. : 990903101013
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN
INDONESIA KANTOR PERWAKILAN CABANG 13-10 JEMBER.

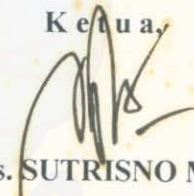
Hari : SENIN
Tanggal : 29 JULI 2002
Jam : 18.00 WIB.
Tempat : FISIP UNIVERSITAS JEMBER
Dan telah dinyatakan Lulus.

Panitia Penguji :

Anggota


Drs. MATNUR HARYONO

NIP. 130 531 992

Ketua,


Drs. SUTRISNO M.Si

NIP. 131 472 794

Mengesahkan :

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Dekan,


Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

MOTTO

Janganlah membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warganegara yang baik.

(Berita pajak No. 1427/XXXIII/15 September 2000).



PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini kupersembahkan untuk :

Orang tuaku tercinta

Sebagai sembah baktiku dan rasa hormatku atas segala kasih sayang dan do'anya yang tiada pernah pupus

Joko Ana, Wawan Naning, Endro Iin, Si-kembar Win dan Sih, Susana

Kakak-kakakku dan adikku yang selalu memberiku semangat dan kekuatan untuk maju

Gilang, Sita, Krisna, Mella, Kunto, Hendra

Keceriaan dan wajah lucu kalian membuatku bahagia

O' Pus

Yang membuat hidupku lebih bersemangat dan berarti

Ervien, Arik, Meme, Cemud, Kikik, Lusti

Sahabat-sahabatku yang selalu memberiku perhatian dan kasih sayang

Almamater yang kucintai dan kujunjung tinggi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas segala kasih dan anugerahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini.

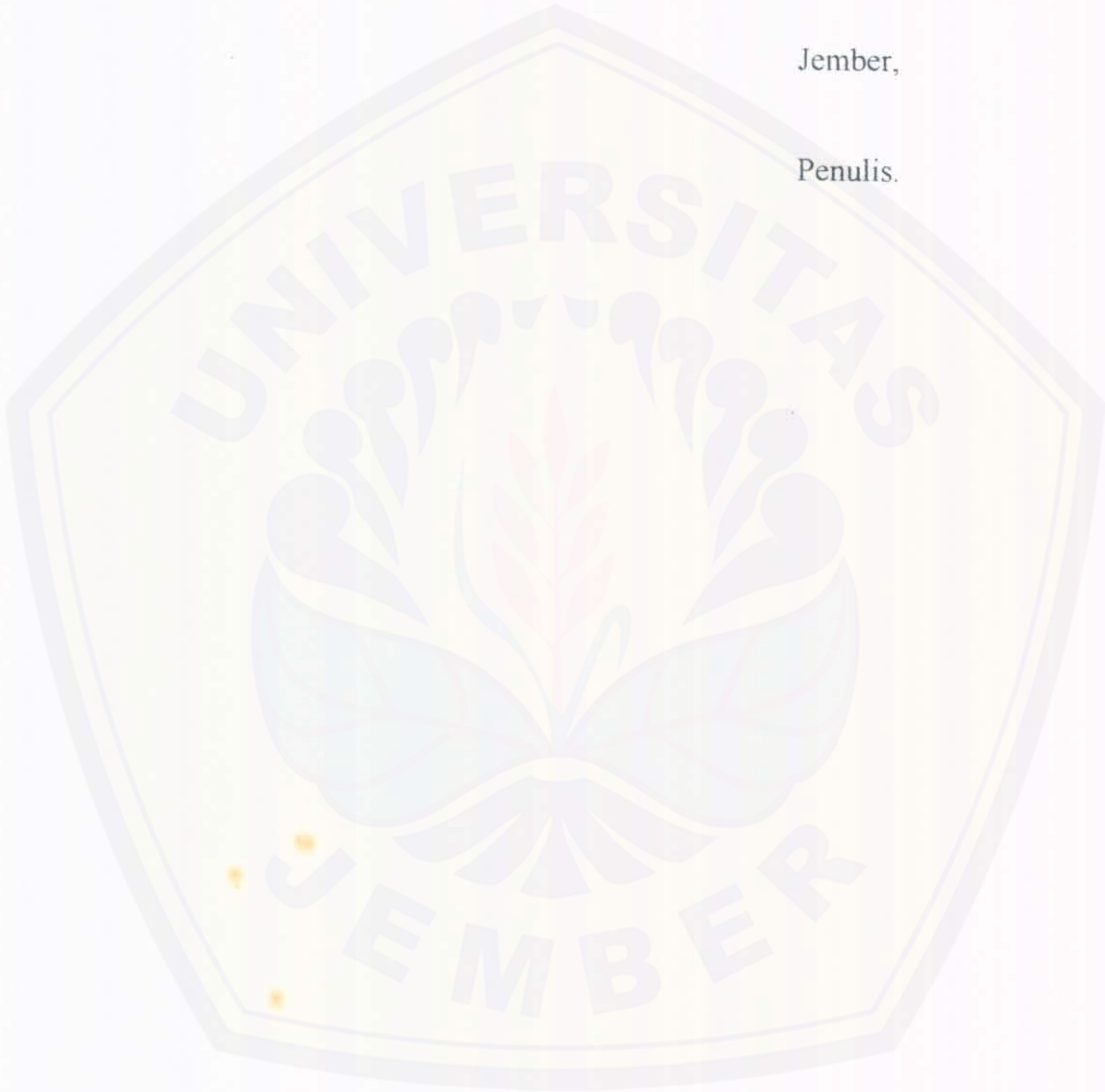
Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan Administrasi Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dengan terselesainya penulisan laporan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil selama penulisan laporan ini, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua program studi D.III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Matnur Haryono, selaku dosen pembimbing laporan Praktek Kerja Nyata.
4. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si, selaku dosen wali.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bapak Mochammad Toha, selaku kepala PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.
7. Bapak Moedji Sudjarwo, selaku Kasie Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.
8. Bapak Sukamto, selaku Kasie Administrasi dan Keuangan PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.
9. Bapak Budi Wusonoadi, selaku Kasie Pelayanan Kepesertaan PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.
10. Segenap karyawan PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesainya laporan ini.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa laporan Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca. Akhirnya semoga laporan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, amin.

Jember,

Penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	4
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	5
2.3 Kegiatan Pokok PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	14
2.4 Bentuk Laporan Kantor.....	16
2.5 Pengeluaran Gaji Pegawai.....	17
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	20
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga (Tempat PKN)	
Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perpajakan.....	37
IV. PENUTUP.....	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi PT. (Persero) ASKES Indonesia
KPC 13-10 Jember.....6



DAFTAR TABEL

1. Jam Kerja PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	21
2. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Mochammad Toha, Kepala KPC PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	28
3. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Moedji Sudjarwo, Kasie Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	29
4. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Sukamto, Kasie Administrasi dan Keuangan PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	30
5. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Budi Wusonoadi, Kasie Kepesertaan dan Pemasaran PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	31
6. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gatot Pramono, Pembantu Perwakilan Cabang PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	32
7. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Harie Purnomo, Pelaksana Kepesertaan dan Pemasaran PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	33
8. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Khoirul Sholeh, Pelaksana Pelayan Kesehatan PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	34
9. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Juani Kamarudin, Kasir PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	35
10. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Rahmad Junaidi, Pelaksana Pembukuan PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
2. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
3. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata
4. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember
5. Kartu Konsultasi
6. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21
7. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1
8. Daftar Gaji Pegawai PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dilihat dari pengertiannya, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro R, 1990:5).

Fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu penerimaan negara, semakin penting dan strategis karena disamping fungsi budgeter (sumber penerimaan uang negara) juga mempunyai fungsi regulierend (mengatur), terutama pada saat kondisi ekonomi bangsa Indonesia dewasa ini yang belum sepenuhnya pulih dari krisis. Karenanya akan semakin banyak pula pengeluaran negara untuk menata ulang ekonomi Indonesia. Oleh karena itu sumber-sumber penerimaan negara harus lebih ditingkatkan, dalam hal ini salah satunya adalah pajak.

Sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama, pemungutan pajak di Indonesia pada dasarnya sudah didasarkan pada Undang-Undang, yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut telah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dan rakyatnya. Maka sudah sewajarnya kalau masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih belum mempunyai kesadaran melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan hal ini merupakan tugas seluruh rakyat Indonesia untuk ikut berperan serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang. Sehubungan dengan besarnya peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Selain usaha dari pemerintah, masyarakat sebagai wajib pajak juga harus mempunyai kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi untuk membayar pajak kepada negara, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu peran serta

masyarakat baik secara aktif maupun pasif sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya penerimaan pajak terhadap negara.

Direktorat Jendral pajak sebagai instansi yang bertanggungjawab langsung terhadap sumber penerimaan negara dari sektor pajak mendapat peran yang cukup penting dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Porsi penerimaan negara dari sektor pajak dalam APBN dari tahun ketahun semakin besar. Hal ini adalah konsekuensi dari upaya mengurangi bantuan luar negeri dengan meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember merupakan badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang jasa asuransi kesehatan, yang pesertanya terdiri dari peserta wajib dan peserta diluar peserta wajib atau bisa disebut juga dengan peserta sukarela. Peserta wajib meliputi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Perintis Kemerdekaan dan Veteran beserta keluarga. Sedangkan peserta sukarela meliputi peserta dari BUMN, Badan Usaha Swasta dan Badan-Badan lainnya seperti ; sekolah, koperasi, yayasan dan lain-lain. PT. (Persero) ASKES Indonesia merupakan unit organisasi yang bertugas membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan sebagai sarana untuk menambah pendapatan negara baik pusat maupun daerah. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan maka di kabupaten Lumajang didirikan kantor pembantu perwakilan cabang Jember. Kantor Pembantu Perwakilan Cabang Jember bertanggungjawab langsung kepada kantor cabang PT. (Persero) ASKES Indonesia yang berkedudukan di Surabaya.

PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember sebagai badan usaha yang cukup besar dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat juga mempunyai kewajiban perpajakan, baik badan usaha itu sendiri maupun pegawai/karyawannya. Dalam hal ini jenis pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan pasal 25 untuk badan usaha dan Pajak Penghasilan pasal 21 untuk pegawai/karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi. Berdasar uraian diatas maka penulis memilih judul **“PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA KPC 13-10 JEMBER”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah :

1. Ingin mendapatkan pengalaman kerja
2. Ingin mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember
3. Ingin memperoleh pengetahuan praktis dari PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

1. Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan program studi perpajakan pada program Diploma III FISIP Universitas Jember
2. Sebagai sarana untuk melatih, menguji dan memperdalam teori-teori perpajakan dengan mempraktekkan langsung pada PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember
3. Untuk memperoleh tambahan pengalaman yang bermanfaat dikemudian hari sebagai bekal memasuki dunia kerja.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia

Sebenarnya sejarah asuransi kesehatan di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum perang dunia II pada tahun 1934. Pemerintah Hindia Belanda mengatur restitusie biaya pelayanan kas bagi para pegawai pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan "*Restitutie Regiling*". Dan hal ini ternyata terus berlaku hingga proklamasi kemerdekaan bagi para pegawai negeri.

Ketentuan tersebut berlaku terus sampai dengan tahun 1968, sehingga pemerintah menyadari bahwa pembiayaan pemeliharaan kas para pegawai negeri sipil dengan cara restitusi tersebut, pada akhirnya akan sangat memberatkan anggaran negara. Oleh karena itu, pada tahun 1968 dikeluarkan Surat Keputusan Presiden nomor 230/1968 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pemeliharaan pada kas prinsipnya adalah berdasarkan gotong-royong dengan mewajibkan setiap peserta menyerahkan iuran setiap bulannya kepada suatu dana bersama yang dikelola oleh suatu badan tertentu dilingkungan Departemen Kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kas (BPDKP). Badan tersebut bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan.

Setelah berjalan kurang lebih 15 tahun, dirasakan bahwa ketentuan yang terdapat pada Keputusan Presiden No. 230/1968 sudah tidak lagi menampung kebutuhan yang semakin berkembang. Sehingga akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968 tentang pemeliharaan sipil dan ABRI beserta keluarga dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1968 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti (PHB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1984 kemudian diperluas lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991 yang antara lain isinya mengatur mengenai kepesertaan sipil dan ABRI, perintis kemerdekaan dan veteran beserta anggota keluarganya yang kemudian disebut sebagai peserta wajib.

Seiring dengan penambahan penduduk, sarana dan prasarana kesehatan akan memadai maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1992 yang

merubah Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. ASKES). Perubahan status ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas cakupan kepesertaan diluar peserta wajib dari Perum Husada Bhakti (PNS, penerima pensiun, perintis kemerdekaan dan veteran beserta keluarga) dengan menampung peserta dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, badan-badan lainnya seperti; sekolah, Perguruan Tinggi, koperasi, yayasan dan lain-lain.

PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember merupakan unit organisasi yang bertugas membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kabupaten Jember dan Lumajang. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan maka kabupaten Lumajang didirikan kantor pembantu perwakilan cabang Jember. Kantor Perwakilan Cabang Jember bertanggung jawab langsung kepada kantor cabang PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang berkedudukan di Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya sebagai kantor perwakilan cabang, maka kantor-kantor perwakilan cabang Jember mempunyai peranan yang cukup besar bagi masyarakat diwilayah kerjanya untuk turut membantu pemerintah dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia khususnya bagi peserta Asuransi Kesehatan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan jalan memberikan pelayanan terhadap kesehatan berupa : rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pelayanan khusus dan pelayanan obat.

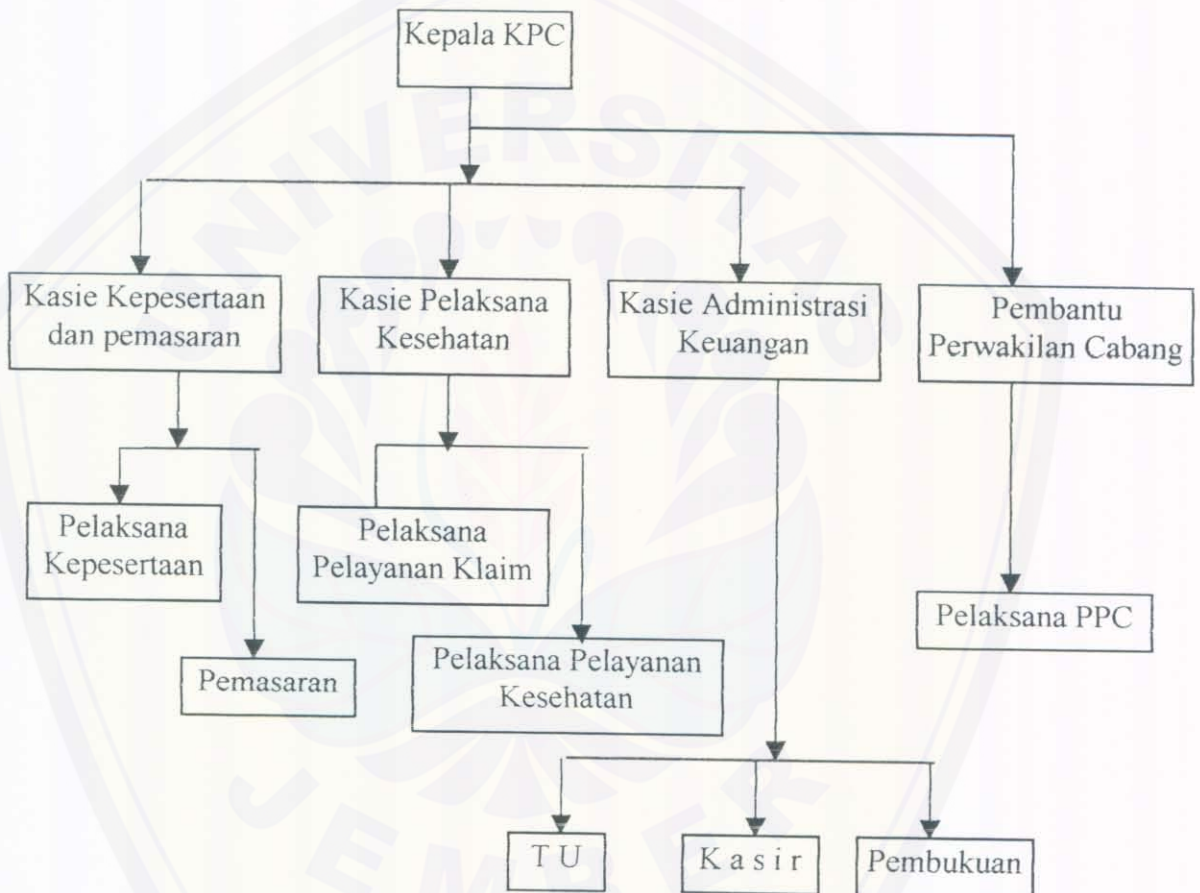
2.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan segenap fungsi dalam organisasi hubungan antara fungsi dan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi yang baik, maka diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi yang diterapkan pada PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember adalah struktur organisasi garis. Dalam struktur organisasi juga disajikan gambaran tugas

dari pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing bagian untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun struktur organisasi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1 : Struktur organisasi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13 - 10 Jember.



Sumber data : PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13 -10 Jember.

Berdasarkan struktur organisasi yang ada maka tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dapat dijelaskan secara terperinci pada uraian berikut ini :

a. Kepala Kantor Perwakilan Cabang

1) Tugas Kepala KPC adalah sebagai berikut :

- a) Memimpin pelaksanaan tugas kantor perwakilan cabang.
- b) Mengkoordinir, membimbing dan membina kepala seksi dan pembantu kepala perwakilan cabang.
- c) Menyusun rencana kerja anggaran KPC.
- d) Melaksanakan program pemeliharaan kesehatan.
- e) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan PPK dan Kepesertaan.
- f) Memantapkan penyuluhan kesehatan dan pengendalian PPK.
- g) Menanggulangi keluhan peserta dan PPK.

2) Wewenang kepala KPC adalah sebagai berikut :

- a) Membuat IKS tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan peserta dan PPK.
- b) Membuat IKS kepesertaan dengan Badan Usaha atau organisasi kemasyarakatan.
- c) Melaksanakan pengadaan obat.
- d) Membuat pengantar surat rujukan atau jaminan pelayanan kesehatan.
- e) Menandatangani cek.
- f) Menyetujui pembayaran.
- g) Mengatur penempatan pelaksana-pelaksana di kantor perwakilan cabang.

3) Tanggungjawab Kepala Kantor Perwakilan Cabang adalah sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi dilingkungan unit masing-masing.
- b) Bertanggung jawab atas fasilitas yang berada dilingkungan unit yang bersangkutan.
- c) Bertanggung jawab atas pembinaan disiplin kepegawaian.
- d) Bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester atau triwulan.

b. Kepala Seksi Kepesertaan dan Pemasaran

- 1) Tugas kepala seksi kepesertaan dan pemasaran adalah sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi kepesertaan dan pemasaran.
 - b) Merencanakan dan melaksanakan program perluasan kepesertaan atau pemasaran serta administrasi peserta.
 - c) Melaksanakan program penyuluhan dan pembinaan peserta.
 - d) Menyelenggarakan penanggulangan keluhan peserta.
 - e) Membuat skala prioritas atau peta pengembangan kepesertaan pemasaran.
- 2) Wewenang kepala seksi kepesertaan dan pemasaran adalah menandatangani kartu peserta sementara.
- 3) Tanggung jawab kepala seksi kepesertaan dan pemasaran adalah sebagai berikut :
 - a) Bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi dilingkungan unit masing-masing.
 - b) Bertanggung jawab atas fasilitas yang berada dilingkungan unit yang bersangkutan.
 - c) Bertanggung jawab atas pembinaan disiplin perpegawaian.
 - d) Bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester atau triwulan.
- 4) Tugas pelayanan kepesertaan adalah sebagai berikut :
 - a) Menerima, meneliti kebenaran dan kelengkapan nomor dan pengesahan daftar isian peserta.
 - b) Mencatat nama peserta secara lengkap didalam buku register peserta.
 - c) Mencatat peserta didalam buku mutasi harian.
 - d) Pengetikan kartu peserta, memberi batas berlakunya dan penempelan foto.

5) Tugas pelayanan pemasaran adalah sebagai berikut :

- a) Mencari informasi tentang pangsa pasar.
- b) Menghubungi dan menyusun jaringan pelayanan.
- c) Menghitung besar premi.
- d) Melakukan penawaran kepada calon peserta.
- e) Menyusun rencana kerjasama.

c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan

1) Tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan pelayanan kas.
- b) Merencanakan program pemeliharaan kas.
- c) Menentukan dan mengganti atas tagihan di PPK.
- d) Mengelola data-data untuk pelayanan dan membuat laporan.
- e) Mengelola obat-obatan mulai dari penerimaan, penyimpanan dan distribusi serta membuat laporan stok obat di gudang dan mengumpulkan laporan penggunaan obat-obatan dari PPK.
- f) Membuat laporan bulanan.

2) Wewenang kepala seksi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Menandatangani pengantar surat rujukan atas nama Kantor Perwakilan Cabang.
- b) Menandatangani surat jaminan atas nama Kantor Perwakilan Cabang.

3) Tanggungjawab kepala seksi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.
- b) Bertanggungjawab atas fasilitas yang berada di lingkungan unit yang bersangkutan.
- c) Bertanggungjawab atas pembinaan disiplin kepegawaian.

- d) Bertanggungjawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester atau triwulan.
- 4) Tugas dari pelaksana pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
- a) Melakukan pengadministrasian peserta ASKES.
 - b) Mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan surat rujukan dan jaminan perawatan.
 - c) Membuat statistik atau gambar yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
 - d) Melaksanakan verifikasi terhadap PPK dalam bidang pelayanan kesehatan.
 - e) Melakukan penyuluhan terhadap PPK dalam bidang pelayanan kesehatan.
 - f) Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - g) Melakukan evaluasi pelaksanaan obat di PPK untuk peserta wajib dan peserta non wajib.
- 5) Tugas pelaksana pemeriksaan klaim pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
- a) Mencatat atau meregister seluruh klaim yang masuk pada buku register klaim dan membubuhkan nomor klaim.
 - b) Meneliti kelengkapan persyaratan dan kebenaran klaim.
 - c) Menghitung jumlah kasus dan mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Mencatat nilai ganti klaim dalam buku register klaim.
 - e) Menyerahkan klaim yang telah diperiksa kepada pelaksana pembukuan yang dilakukan verifikasi ulang.
 - f) Membuat grafik biaya pelayanan kesehatan/unit coct masing-masing pelaporan.

d. Kepala Seksi Administrasi Keuangan

- 1) Tugas kepala seksi administrasi keuangan adalah sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi administrasi keuangan.
 - b) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran alat-alat keuangan.
 - c) Melakukan investasi finansial.
 - d) Melaksanakan sistem akuntansi perusahaan.
 - e) Menyelenggarakan pengendalian anggaran.
 - f) Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.
 - g) Menyimpan arsip-arsip pertanggungjawaban keuangan dan arsip lainnya.
- 2) Wewenang kepala seksi administrasi keuangan adalah sebagai berikut :
 - a) Memutuskan penerimaan atau penolakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penagihan.
 - b) Menetapkan keamanan dan tata tertib Kantor Perwakilan Cabang.
 - c) Memberikan keterangan atau penjelasan sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan yang sifatnya diperkenankan dan diketahui umum.
- 3) Tanggungjawab kepala seksi administrasi keuangan adalah sebagai berikut :
 - a) Bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.
 - b) Bertanggungjawab atas fasilitas yang berada di lingkungan unit yang bersangkutan.
 - c) Bertanggungjawab atas pembinaan disiplin kepegawaian.
 - d) Bertanggungjawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester atau triwulan.

- 4) Tugas pemegang kas atau kasir antara lain adalah sebagai berikut :
 - a) Menerima, menyimpan, mengeluarkan uang tunai untuk membayar klaim atau tagihan yang telah disetujui oleh kepala seksi keuangan dan kepegawaian Kantor Perwakilan Cabang.
 - b) Melakukan pencatatan dalam buku tunai, buku bank, register cheque atau bilyet giro.
 - c) Menyampaikan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran setiap hari kepada pelaksana pembukuan.
 - d) Menulis cheque atau bilyet giro.
 - e) Melakukan pemotongan pajak dan pembayaran pajak.
 - f) Membayar gaji atau tunjangan.
 - g) Melakukan pencatatan dan pengelolaan investasi.
 - 5) Tugas pelaksana administrasi keuangan adalah sebagai berikut :
 - a) Melakukan tata pembukuan dalam kas atau bank KPC.
 - b) Membuat pertanggungjawaban keuangan KPC.
 - c) Membuat KPA.
 - d) Melaksanakan penjurnalan dalam buku jurnal atau slip jurnal.
 - e) Melaksanakan klaim yang telah diverifikasi oleh urusan pelayanan.
 - 6) Tugas pelaksana tata usaha adalah sebagai berikut :
 - a) Mencatat surat keluar dan surat masuk.
 - b) Mengetik dan mendistribusikan surat serta melaksanakan penggandaan.
 - c) Menyusun kearsipan atau dokumentasi.
 - d) Melaksanakan urusan umum, fasilitas perlengkapan, pengaturan kendaraan dinas.
- e. Pembantu Perwakilan Cabang
- 1) Tugas pembantu perwakilan cabang adalah sebagai berikut :
 - a) Melakukan pengamatan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - b) Melakukan pengolahan data pelayanan kesehatan dan peserta.

- c) Memberi penyuluhan dan menyelesaikan keluhan peserta dan PPK.
 - d) Menerima klaim-klaim dari PPK dan peserta serta menyampaikan ke KPC.
 - e) Menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan uang muka kerja.
- 2) Wewenang pembantu perwakilan cabang adalah sebagai berikut :
- a) Menerbitkan, menandatangani kartu peserta sementara atas nama kepala Kantor Perwakilan Cabang.
 - b) Melegalisir surat pengantar rujukan keluar daerah.
 - c) Memberikan atau menandatangani jaminan pelayanan kesehatan atas nama kepala Kantor Perwakilan Cabang.
 - d) Menyimpan uang muka kerja.
- 3) Tanggungjawab pembantu perwakilan cabang adalah sebagai berikut :
- a) Bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsi dilingkungan unit masing-masing.
 - b) Bertanggungjawab atas fasilitas yang berada dilingkungan unit yang bersangkutan.
 - c) Bertanggungjawab atas pembinaan disiplin kepegawaian.
 - d) Bertanggungjawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester atau triwulan.
- 4) Tugas pelaksana pembantu perwakilan cabang adalah sebagai berikut :
- a) Melakukan administrasi kepesertaan.
 - b) Membuat laporan bulanan.
 - c) Mencatat seluruh klaim yang masuk wilayah Pembantu Perwakilan Cabang.
 - d) Verifikasi klaim PPK (kolektif maupun klaim perorangan).
 - e) Membayar klaim perorangan.
 - f) Melaksanakan pelayanan kas kepada peserta (jaminan, kacamata).

2.3 Kegiatan Pokok

PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember merupakan unit organisasi yang bergerak di bidang pelayanan jasa, yang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya berada di bawah pengawasan kantor cabang. Kegiatan pokok PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 di bagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu aktifitas atau kegiatan bagian kepesertaan dan pemasaran, aktifitas pelayanan kesehatan dan aktifitas administrasi keuangan.

2.3.1. Kegiatan pokok bagian kepesertaan dan pemasaran adalah sebagai berikut:

- a. Mengentry data ke komputer untuk diterbitkan kartu ASKES peserta dan keluarganya.
- b. Memberi kode yang ada pada komputer sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor cabang.
- c. Memberi kode desa sesuai dengan Daerah Tingkat II Jember.
- d. Memberi kode puskesmas sesuai dengan lingkup Daerah Tingkat II Jember.
- e. Memberi kode instansi sesuai dengan ketentuan.
- f. Memberi stempel cap sah apabila sudah ditandatangani oleh kepala Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.

2.3.2. Kegiatan pokok bagian pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima klaim atau tagihan PPK yang meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, obat rawat jalan dan obat rawat inap.
- b. Menkonversi atau meneliti kebenaran dan kelengkapan serta meneliti (memilah-milahkan perbulan pelayanan) klaim yang masuk dari PPK.
- c. Meregister klaim atau data pengobatan, mengentry data tersebut ke dalam komputer untuk persiapan pembayaran selanjutnya dari data

tersebut dikeluarkan voucher sebagai bukti pengeluaran atau biaya pembayaran.

2.3.3. Kegiatan pokok bagian administrasi dan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti ulang klaim yang masuk dari pelayanan untuk dinyatakan sah atau tidak sah, klaim tersebut harus dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) sudah diverifikasi
 - 2) sudah ditandatangani kepala seksi pelayanan.
 - 3) Ada bukti pendukung yang memenuhi persyaratan yaitu : kwitansi, bukti pelayanan dari pengaju klaim, harus ada paraf dari penderita, harus ada fotokopi kartu ASKES, harus ada paraf dokter yang merawat, dan harus ada stempel pengajuan.
Setelah ketentuan tersebut dinyatakan lengkap maka kasir membuat kwitansi pembayaran dan diajukan ke kepala seksi administrasi dan keuangan, lalu di paraf setelah diajukan ke kepala Kantor Perwakilan Cabang sebagai penanggung jawab pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka data klaim tersebut dientrykan ke data pelaksanaan pembukuan dan dikeluarkan vouchernya kemudian dibayarkan kepada peserta atau pelaksana pembayaran klaim.
- b. Menyiapkan klaim dokter keluarga untuk dibayar.
- c. Memotong pajak dokter keluarga kemudian di bayar langsung ke bank.
- d. Mengadakan pengelolaan data keuangan serta pembelian data untuk dijadikan sebuah surat pertanggungjawaban keuangan sebagai penanggungjawab Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember kepada kantor cabang Propinsi Jawa Timur.
- e. Membuat Surat Perjalanan Dinas (SPD) baik itu atasan maupun bawahan apabila ada kepentingan yang bersifat mendesak yaitu berupa rapat dinas regional maupun rapat nasional yang

dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember, maka SPD tersebut diberikan kepada bawahan yang bersifat komunikasi tentang pekerjaan yang dibebankan bila ada perubahan sistem.

- f. Membuat pajak pegawai yang ada pada Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember selama periode berjangka apabila pegawai tersebut mutasi kerja maka diadakan Surat Pemberitahuan tentang pajak terhutang kepada Kantor Perwakilan Cabang.
- g. Membuat absensi kerja karyawan dalam buku bulanan.
- h. Menyediakan alat kerja kantor, seperti alat tulis kantor, filing cabinet, komputer, mesin ketik, stempel, kursi tamu, ruang rapat serta melaksanakan surat menyurat penataan arsip.

2.4 Bentuk Laporan Kantor

Kantor Perwakilan Cabang Jember adalah unit organisasi pelaksanaan kegiatan yang diawasi oleh kantor cabang. Bentuk laporan yang diperiksa oleh kantor cabang adalah sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

Laporan bulanan adalah suatu hasil kerja atau aktifitas yang dilakukan oleh masing-masing seksi sebagai pertanggungjawaban dari hasil kerjanya, sebagai berikut :

a. Kepala Seksi Pemasaran

Memberikan laporan tentang pergantian kartu, pengembangan peserta ASKES, pemantauan hasil kemajuan ASKES terhadap peserta lain, perkembangan cakupan, perkembangan pemasaran dan emboss kartu.

b. Kepala Seksi Pelayanan

Memberikan laporan tentang distribusi data, pengelolaan obat-obatan, dan pemantauan stock obat di gudang serta penggunaan obat dari PPK.

c. Kepala Seksi Keuangan

Melaporkan dari hasil kegiatan atau aktifitas setiap harinya yaitu : pembayaran klaim, biaya-biaya yang harus dikeluarkan serta pendapatan

yang diterima dicatat, diklasifikasikan, digolongkan dan dikelompokkan yang berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) atas pekerjaannya.

2. Laporan Triwulan

Laporan triwulan adalah hasil kegiatan atau aktifitas selama jangka waktu tiga bulan yaitu rekapan dari bulan Januari, Februari dan Maret pada periode tahun berjalan.

3. Laporan Tahunan

Laporan tahunan adalah hasil kerja atau kegiatan dari masing-masing kepala seksi yang dilakukan selama satu periode sebagai pertanggungjawaban atas perkembangan aktifitas Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember apakah mengalami hambatan atau kelancaran dari hasil kerjanya selama satu tahun. Dengan demikian laporan tersebut dipakai sebagai tolok ukur untuk kantor cabang Jawa Timur yang mana hasil kerja tersebut perlu dibenahi atau diperbaiki sistem kerjanya untuk tahun yang akan datang.

2.5 Pengeluaran Gaji Pegawai

1. Dokumen dan Buku

- a. Daftar gaji dan tunjangan-tunjangan
- b. Bukti pengeluaran kas/bank
- c. Buku kas/bank
- d. Catatan kas/bank
- e. Slip jurnal kas/bank

2. Prosedur

- a. Daftar gaji dan tunjangan dibuat oleh petugas seksi administrasi dan keuangan kemudian dimintakan persetujuan kepada kepala kantor cabang, setelah itu berkas tersebut diteruskan kepada seksi administrasi dan keuangan.
- b. Petugas pembukuan setelah menerima berkas tersebut, melakukan penelitian mengenai penjumlahan dan kelengkapannya. Apabila diketahui benar, maka dibuatkan bukti pengeluaran kas/bank. Selanjutnya berkas

tersebut diteruskan kepada kepala seksi administrasi dan keuangan dan kepala kantor cabang untuk mendapatkan persetujuan.

- c. Setelah disetujui, petugas pembukuan membukukannya pada buku kas/bank sebelah kredit dengan perkiraan lawan biaya gaji, biaya tunjangan-tunjangan (diperinci sesuai jenis biaya). Kemudian berkas tersebut diteruskan kepada kasir untuk dilakukan pembayaran.
- d. Kasir setelah meneliti ulang melakukan pembayaran dan mencatatnya pada catatan kas/bank sebelah pengeluaran (kredit), memberi cap "LUNAS", tanggal, memaraf di kwitansi dan menandatangani bukti pengeluaran kas/bank. Berkas asli dikirimkan kembali kepada petugas pembukuan untuk disimpan sebagai arsip.
- e. Pada akhir minggu, petugas pembukuan membuat slip jurnal kas/bank, dengan ketentuan :
Debet : biaya gaji
Kredit : kas/bank

3. Pengeluaran Tunjangan PPh Karyawan

- a. Dokumen dan buku
 - 1) Daftar perhitungan pajak
 - 2) Bukti pengeluaran bank
 - 3) Buku bank
 - 4) Catatan bank
 - 5) Slip jurnal bank
- b. Prosedur
 - 1) Berdasarkan perhitungan pajak bulanan sementara yang dibuat oleh seksi administrasi dan keuangan, oleh petugas pembukuan dibuatkan bukti pengeluaran bank, kemudian diteruskan ke seksi administrasi dan keuangan dan kepala kantor cabang untuk mendapatkan persetujuan.
 - 2) Setelah mendapat persetujuan, petugas pembukuan membukukannya dalam buku bank sebelah pengeluaran dengan perkiraan lawan biaya

tunjangan Pajak Penghasilan pegawai, setelah itu berkas diteruskan ke kasir.

- 3) Kasir meneliti ulang kebenaran perhitungan atas tunjangan PPh karyawan tersebut dan bila sudah cocok disetorkan ke kas negara/bank paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dicatat dalam catatan bank sebelah kredit. Kemudian berkas dikembalikan ke petugas pembukuan untuk disimpan sebagai arsip.
- 4) Pada akhir minggu, petugas pembukuan membuat slip jurnal bank sebagai berikut :
Debet : biaya tunjangan PPh karyawan
Kredit : bank
- 5) Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya petugas seksi administrasi dan keuangan melaporkannya ke kantor pajak.
- 6) Pada akhir tahun petugas seksi administrasi dan keuangan membuat perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan mengisi formulir SPT yang sudah disediakan kantor pajak. Selisih antara jumlah perhitungan dengan realisasinya adalah merupakan pajak yang terhutang yang harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan praktek pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember. Praktek Kerja Nyata dilakukan dengan bekerja langsung dan membantu aktifitas pada seluruh bagian yaitu bagian kepesertaan dan pemasaran, bagian pelayanan kesehatan, serta pada bagian administrasi keuangan. Praktek Kerja Nyata pada bagian keuangan lebih diperdalam karena pada bagian ini erat kaitannya dengan pokok permasalahan dari judul yang telah dipilih yaitu Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis mengadakan beberapa tahapan kegiatan, diantaranya :

1. Melakukan survei ke kantor PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember pada bagian administrasi dan kepegawaian untuk menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan.
2. Menyampaikan surat ijin permohonan (surat pengantar) Praktek Kerja Nyata dari bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember kepada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dan menunggu surat balasan.
3. Setelah menerima surat balasan dari kantor PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember, penulis mengisi surat pernyataan yang diisi dengan benar selama kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan.
4. Menyerahkan surat tugas dan surat pernyataan pada kantor PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.

5. Bersama dengan supervisor Praktek Kerja Nyata, yaitu Dra. Anastasia Murdiastuti, M.Si penulis diserahkan langsung kepada bagian administrasi dan kepegawaian untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang Jember dilaksanakan selama satu bulan (30 hari) yaitu mulai tanggal 11 Maret sampai dengan 11 April 2002, dengan menerapkan lima hari kerja efektif yaitu Senin sampai dengan Jum'at. Adapun jam kerja yang diberlakukan pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Jam Kerja PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin-kamis	07.30-15.00	12.00-12.30
Jum'at	07.30-15.00	11.30-12.30
Sabtu	Libur	Libur

Sumber : PT. (Persero) ASKES Indonesia Kator Perwakilan Cabang 13-10 Jember

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh penulis pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dalam 1 (satu) bulan adalah :

Minggu I : penulis diserahkan langsung kepada kepala seksi kepegawaian Bapak Sukanto oleh supervisor Praktek Kerja Nyata yaitu Dra. Anastasia Murdiastuti, M.Si. Setelah itu penulis diperkenalkan kepada seluruh pegawai dan diberikan pengarahan mengenai segala sesuatu tentang PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.

Minggu II : penulis mulai mencari data tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan yang ada di PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember, pada bagian administrasi dan keuangan, yaitu :

- a. bagaimana cara pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap
- b. siapa saja yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap
- c. bagaimana cara pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap, yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan judul laporan sehingga dalam mencari data sudah benar-benar sesuai dengan judul yang diambil.

Minggu III : penulis mulai mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnyanya tentang Pajak Penghasilan atas pegawai tetap dan tata cara pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember, pada bagian administrasi dan keuangan, yaitu kepada Bapak Sukamto selaku kepala seksi administrasi dan keuangan.

Minggu IV : penulis bertanya tentang hal-hal yang masih kurang jelas atau kurang dimengerti kepada Bapak Sukamto selaku kepala seksi administrasi dan keuangan PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember. Pada minggu ini, penulis benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena minggu ini merupakan minggu terakhir pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

3.1.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata yang penulis peroleh selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember. Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata diperoleh tambahan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan pasal 21, khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.

Pajak Penghasilan pasal 21,

adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Mardiasmo, 1999 : 87)

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 21 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2000, bahwa “pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”, wajib dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai,
- b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan,
- c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua,
- d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya,

- e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri,
- f. yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi,
- g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan,
- h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Selanjutnya, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun,
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap,

- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan,
- d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis,
- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. (Mardiasmo, 1999 : 87)

Adapun jumlah pegawai tetap pada PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember adalah 9 (sembilan) pegawai, yaitu :

1. Bapak Mochammad Toha, yang menjabat sebagai kepala Kantor Perwakilan Cabang.
2. Bapak Moedji Sudjarwo, yang menjabat sebagai kepala seksi pelayanan kesehatan.
3. Bapak Sukamto, yang menjabat sebagai kepala seksi administrasi dan keuangan.
4. Bapak Budi Wusonoadi, yang menjabat sebagai kepala seksi kepesertaan dan pemasaran.
5. Bapak Gatot Pramono, yang menjabat sebagai Pembantu Perwakilan Cabang.
6. Bapak Harie Purnomo, yang menjabat sebagai pelaksana kepesertaan dan pemasaran.
7. Bapak Khoirul Sholeh, yang menjabat sebagai pelaksana pelayanan kesehatan.
8. Ibu Juani Kamarudin, yang menjabat sebagai kasir.
9. Bapak Rahmad Junaedi, yang menjabat sebagai pelaksana pembukuan.

Adapun hak dan kewajiban pegawai tetap adalah sebagai berikut :

1. Hak pegawai tetap :
 - a) memperoleh gaji sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing
 - b) memperoleh tunjangan sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing.
2. Kewajiban pegawai tetap :
 - a) bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi dilingkungan unit masing-masing
 - b) bertanggung jawab atas fasilitas yang berada dilingkungan unit yang bersangkutan
 - c) bertanggung jawab atas pembinaan disiplin pegawai
 - d) bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap semester/tahunan.

Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember menggunakan tata cara seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Cara menghitung Pajak Penghasilan adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember adalah sebagai berikut :

1. Sebelum dihitung Pajak Penghasilan pasal 21 terlebih dahulu dicari penghasilan netto yang diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto.
2. Setelah diketahui penghasilan netto setahun ditentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Undang-undang Pajak Penghasilan nomor 17 tahun 2000 pasal 17 adalah sebesar :
 - a. Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi,

- b. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin,
 - c. Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga,
 - d. Sedangkan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan meskipun kawin dan punya tanggungan hanya sebesar Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dirinya sendiri, kecuali ada keterangan tertulis bahwa suami tidak bekerja.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dapat diketahui dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif seperti dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhitung sejak 1 Januari 2001 terjadi perubahan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam pasal 17. Adapun tarif pajak yang ditetapkan adalah :
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagai berikut :
 - 5% x Rp. 25.000.000,00
 - 10% x Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00
 - 15% x Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00
 - 25% x Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00
 - 35% x Rp. Diatas Rp. 200.000.000,00
 - b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut :
 - 10% x Rp. 50.000.000,00
 - 15% x Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00
 - 30% x Rp. Diatas 100.000.000,00

Tarif yang digunakan pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sama dengan ketentuan tarif seperti keterangan diatas.

Berikut ini contoh penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember :

- 1) Mochammad Toha bekerja pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dengan memperoleh gaji pokok Rp. 1.300.000,00 dan tunjangan Rp. 500.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan Mochammad Toha dalam tahun 2001 adalah :

Tabel 2 : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Mochammad Toha, kepala Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

1	Gaji Pokok		Rp. 1.300.000,00
	Tunjangan		Rp. 500.000,00
	Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.800.000,00
	Pengurangan :		
	Biaya jabatan (5% x Rp. 1.800.000,00)	Rp. 90.000,00	
	Penghasilan netto		Rp. 1.710.000,00
	Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 1.710.000,00)		Rp. 20.520.000,00
	Dikurangi PTKP		
	- untuk diri WP	Rp. 2.880.000,00	
	- kawin	Rp. 1.440.000,00	
	- tanggungan 2 orang	Rp. 2.880.000,00	
	Jumlah PTKP		Rp. 7.200.000,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 13.320.000,00
3.	PPh pasal 21 setahun (5% x Rp. 13.320.000,00)		Rp. 666.000,00
4.	PPh pasal 21 sebulan (Rp. 666.000,00 : 12)		Rp. 55.000,00

Sumber : PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

- 2) Moedji Sudjarwo bekerja pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dengan memperoleh gaji pokok Rp. 1.200.000,00 dan tunjangan Rp. 400.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan Moedji Sudjarwo dalam tahun 2001 adalah :

Tabel 3 : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Moedji Sudjarwo, kepala seksi pelayanan kesehatan Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

1	Gaji Pokok		Rp. 1.200.000,00
	Tunjangan		Rp. 400.000,00
	Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.600.000,00
	Pengurangan :		
	Biaya jabatan (5% x Rp. 1.600.000,00)	Rp. 80.000,00	
	Penghasilan netto		Rp. 1.520.000,00
	Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 1.520.000,00)		Rp. 18.240.000,00
	Dikurangi PTKP		
	- untuk diri WP	Rp. 2.880.000,00	
	- kawin	Rp. 1.440.000,00	
	- tanggungan 3 orang	Rp. 4.320.000,00	
	Jumlah PTKP		Rp. 8.640.000,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 9.600.000,00
3.	PPh pasal 21 setahun (5% x Rp. 9.600.000,00)		Rp. 480.000,00
4.	PPh pasal 21 sebulan (Rp. 480.000,00 : 12)		Rp. 40.000,00

Sumber : PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

- 3) Sukamto bekerja pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dengan memperoleh gaji pokok Rp. 1.150.000,00 dan tunjangan Rp. 400.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan Sukamto dalam tahun 2001 adalah :

Tabel 4 : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Sukamto, kepala seksi administrasi dan keuangan Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

1	Gaji Pokok		Rp. 1.150.000,00
	Tunjangan		Rp. 400.000,00
	Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.550.000,00
	Pengurangan :		
	Biaya jabatan (5% x Rp. 1.550.000,00)	Rp. 77.500,00	
	Penghasilan netto		Rp. 1.472.500,00
	Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 1.472.500,00)		Rp. 17.670.000,00
	Dikurangi PTKP		
	- untuk diri WP	Rp. 2.880.000,00	
	- kawin	Rp. 1.440.000,00	
	- tanggungan 2 orang	Rp. 2.880.000,00	
	Jumlah PTKP		Rp. 7.200.000,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 10.470.000,00
3.	PPh pasal 21 setahun (5% x Rp. 10.470.000,00)		Rp. 523.500,00
4.	PPh pasal 21 sebulan (Rp. 523.500,00 : 12)		Rp. 43.625,00

Sumber : PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

- 4) Budi Wusonoadi bekerja pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dengan memperoleh gaji pokok Rp. 1.100.000,00 dan tunjangan Rp. 350.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan Budi Wusonoadi dalam tahun 2001 adalah :

Tabel 5 : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Budi Wusonoadi, kepala seksi kepesertaan dan pemasaran Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

1	Gaji Pokok		Rp. 1.100.000,00
	Tunjangan		Rp. 350.000,00
	Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.450.000,00
	Pengurangan :		
	Biaya jabatan (5% x Rp. 1.450.000,00)	Rp. 72.500,00	
	Penghasilan netto		Rp. 1.377.500,00
	Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 1.377.500,00)		Rp. 16.530.000,00
	Dikurangi PTKP		
	- untuk diri WP	Rp. 2.880.000,00	
	- kawin	Rp. 1.440.000,00	
	Jumlah PTKP		Rp. 4.320.000,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 12.210.000,00
3.	PPh pasal 21 setahun (5% x Rp. 12.210.000,00)		Rp. 610.500,00
4.	PPh pasal 21 sebulan (Rp. 610.500,00 : 12)		Rp. 50.875,00

Sumber : PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

- 5) Gatot Pramono bekerja pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dengan memperoleh gaji pokok Rp. 1.100.000,00 dan tunjangan Rp. 350.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan Gatot Pramono dalam tahun 2001 adalah :

Tabel 6 : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Gatot Pramono, Pembantu Perwakilan Cabang Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

1	Gaji Pokok		Rp. 1.100.000,00
	Tunjangan		Rp. 350.000,00
	Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.450.000,00
	Pengurangan :		
	Biaya jabatan (5% x Rp. 1.450.000,00)	Rp. 72.500,00	
	Penghasilan netto		Rp. 1.377.500,00
	Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 1.377.500,00)		Rp. 16.530.000,00
	Dikurangi PTKP		
	- untuk diri WP	Rp. 2.880.000,00	
	- kawin	Rp. 1.440.000,00	
	- tanggungan 1 orang	Rp. 1.440.000,00	
	Jumlah PTKP		Rp. 5.760.000,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 10.770.000,00
3.	PPh pasal 21 setahun (5% x Rp. 10.770.000,00)		Rp. 538.500,00
4.	PPh pasal 21 sebulan (Rp. 538.500,00 : 12)		Rp. 44.875,00

Sumber : PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

- 6) Harie Purnomo bekerja pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dengan memperoleh gaji pokok Rp. 1.000.000,00 dan tunjangan Rp. 300.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan Harie Purnomo dalam tahun 2001 adalah :

Tabel 7 : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Harie Purnomo, pelaksana kepesertaan dan pemasaran Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

1	Gaji Pokok		Rp. 1.000.000,00
	Tunjangan		Rp. 300.000,00
	Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.300.000,00
	Pengurangan :		
	Biaya jabatan (5% x Rp. 1.300.000,00)	Rp. 65.000,00	
	Penghasilan netto		Rp. 1.235.000,00
	Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 1.235.000,00)		Rp. 14.820.000,00
	Dikurangi PTKP		
	- untuk diri WP	Rp. 2.880.000,00	
	- kawin	Rp. 1.440.000,00	
	- tanggungan 2 orang	Rp. 2.880.000,00	
	Jumlah PTKP		Rp. 7.200.000,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 7.620.000,00
3.	PPh pasal 21 setahun (5% x Rp. 7.620.000,00)		Rp. 381.000,00
4.	PPh pasal 21 sebulan (Rp. 381.000,00 : 12)		Rp. 31.750,00

Sumber : PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

- 7) Khoirul Sholeh bekerja pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dengan memperoleh gaji pokok Rp. 1.000.000,00 dan tunjangan Rp. 300.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan Khoirul Sholeh dalam tahun 2001 adalah :

Tabel 8 : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Khoirul Sholeh, pelaksana pelayanan kesehatan Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

1	Gaji Pokok		Rp. 1.000.000,00
	Tunjangan		Rp. 300.000,00
	Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.300.000,00
	Pengurangan :		
	Biaya jabatan (5% x Rp. 1.300.000,00)	Rp. 65.000,00	
	Penghasilan netto		Rp. 1.235.000,00
	Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 1.235.000,00)		Rp. 14.820.000,00
	Dikurangi PTKP		
	- untuk diri WP	Rp. 2.880.000,00	
	- kawin	Rp. 1.440.000,00	
	- tanggungan 1 orang	Rp. 1.440.000,00	
	Jumlah PTKP		Rp. 5.760.000,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 9.060.000,00
3.	PPh pasal 21 setahun (5% x Rp. 9.060.000,00)		Rp. 453.000,00
4.	PPh pasal 21 sebulan (Rp. 453.000,00 : 12)		Rp. 37.500,00

Sumber : PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

- 8) Juani Kamarudin bekerja pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dengan memperoleh gaji pokok Rp. 1.000.000,00 dan tunjangan Rp. 250.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan Juani Kamarudin dalam tahun 2001 adalah :

Tabel 9 : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Juani Kamarudin, kasir Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

1	Gaji Pokok		Rp. 1.000.000,00
	Tunjangan		Rp. 250.000,00
	Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.250.000,00
	Pengurangan :		
	Biaya jabatan (5% x Rp. 1.250.000,00)	Rp. 62.500,00	
	Penghasilan netto		Rp. 1.187.500,00
	Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 1.187.500,00)		Rp. 14.250.000,00
	Dikurangi PTKP		
	- untuk diri WP	Rp. 2.880.000,00	
	- kawin	Rp. 1.440.000,00	
	- tanggungan 3 orang	Rp. 4.320.000,00	
	Jumlah PTKP		Rp. 8.640.000,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 5.610.000,00
3.	PPh pasal 21 setahun (5% x Rp. 5.610.000,00)		Rp. 280.500,00
4.	PPh pasal 21 sebulan (Rp. 280.500,00 : 12)		Rp. 23.375,00

Sumber : PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

- 9) Rahmad Junaedi bekerja pada PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember dengan memperoleh gaji pokok Rp. 900.000,00 dan tunjangan Rp. 200.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan Rahmad Junaedi dalam tahun 2001 adalah :

Tabel 10 : Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Rahmad Junaedi, pelaksana pembukuan Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember

1	Gaji Pokok		Rp. 900.000,00
	Tunjangan		Rp. 200.000,00
	Jumlah penghasilan bruto		Rp. 1.100.000,00
	Pengurangan :		
	Biaya jabatan (5% x Rp. 1.100.000,00)	Rp. 55.000,00	
	Penghasilan netto		Rp. 1.045.000,00
	Penghasilan netto setahun (12 x Rp. 1.045.000,00)		Rp. 12.540.000,00
	Dikurangi PTKP		
	- untuk diri WP	Rp. 2.880.000,00	
	Jumlah PTKP		Rp. 2.880.000,00
2.	Penghasilan Kena Pajak		Rp. 9.660.000,00
3.	PPh pasal 21 setahun (5% x Rp. 9.660.000,00)		Rp. 483.000,00
4.	PPh pasal 21 sebulan (Rp. 483.000,00 : 12)		Rp. 40.250,00

Sumber : PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember

3.2 Penilaian terhadap kegiatan lembaga tempat (Praktek Kerja Nyata) dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh pegawai PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.061.016.0-626.001 sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan melakukan kewajiban perpajakannya secara rutin dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang juga dilakukan (secara kolektif) oleh pemotong, dalam hal ini PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.

Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember atas pegawainya akan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesulitan dan denda yang dikenakan jika terlambat melakukan penyetoran/pelaporan.

PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan cabang 13-10 Jember dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawainya menggunakan penghitungan tahunan secara manual dan melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam tahun pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan beserta lampirannya. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 disampaikan sebelum tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember menggunakan sistem self assesment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus

dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

Dilihat dari Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) PT. (Persero) ASKES Indonesia, jumlah pajak terutang yang disetorkan sudah sesuai dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.



IV. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang maha kasih atas berkatnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember. Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember, penulis tidak menemukan kesulitan dalam penghitungan PPh pasal 21, karena penghitungan PPh pasal 21-nya menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam UU PPh. Untuk menghitung PPh pasal 21-nya PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember mendapat petunjuk dari KPP sehingga mudah dalam pelaksanaannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap pegawai PT (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungannya, dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini. Akhirnya dalam penulisan laporan tugas akhir ini, harapan penulis mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 1999, Perpajakan. Edisi VII Yogyakarta, Andi Yogyakarta.

Soemitro R. 1990, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Petunjuk Teknis Program Kerja Tahun 2001 PT (Persero) ASKES Indonesia Kantor Perwakilan Cabang 13-10 Jember.



SURAT - TUGAS.

No. : 748 /J2S.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Luky Yaswati	99- 1013
2.	Rita Maria Y	99- 1029

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. ASEKES Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2002 s/d 11 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Maret 2002

Dekan

Moch. Toerki
524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



DAFTAR HADIR KEGIATAN PKN
MAHASISWA FISIP UNEJ (D3 PERPAJAKAN)

NO.	TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	11 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
2	12 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
3	13 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
4	14 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
5	18 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
6	19 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
7	20 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
8	21 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
9	22 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
10	25 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
11	26 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
12	27 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
13	28 Maret 2002	<i>M. Fahalip</i>	
14	01 April 2002	<i>M. Fahalip</i>	
15	02 April 2002	<i>M. Fahalip</i>	
16	03 April 2002	<i>M. Fahalip</i>	
17	04 April 2002	<i>M. Fahalip</i>	
18	05 April 2002	<i>M. Fahalip</i>	
19	08 April 2002	<i>M. Fahalip</i>	
20	09 April 2002	<i>M. Fahalip</i>	
21	10 April 2002	<i>M. Fahalip</i>	
22	11 April 2002	<i>M. Fahalip</i>	



Nomor : 260/13-10/0402

Jember, April 2002

Lamp : -

Perihal : Hasil Praktek Kerja Nyata
Mahasiswa FISIP Unej

Kepada Yth :

Sdr. Dekan FISIP

Universitas Jember

di_

JEMBER

Menunjuk surat nomor : 4017/j25.1.4/p.6/2001 tanggal 07 Maret 2002 perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami informasikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N A M A : LUKI YASWATI
N I M : 99-1013
PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN

Telah mengikuti kegiatan dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 11 Maret s/d 11 April 2002. Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata menurut penilaian kami telah menunjukkan disiplin dan dedikasi yang baik.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



ASKEG
KPC 13 - 10

Kepala,


JUAMI KAMARUDIN

SK/rj/HM 00.04

**JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN CABANG 13-10 JEMBER**

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	11 Maret 2002	Pembukaan PKN yang dilakukan di kantor PT. (Persero) ASKES Indonesia KPC 13-10 Jember. Perkenalan dengan para staff dan karyawan. Pengarahan tentang seluruh bagian yang ada di KPC 13-10 Jember.
2.	12 Maret 2002	Membantu bagian pelayanan kepesertaan melayani peserta wajib.
3.	13 Maret 2002	Membantu bagian pelayanan kepesertaan melayani peserta wajib. Menerima pengarahan dari bagian pelayanan tentang tata cara pengisian daftar isian.
4.	13 Maret 2002	Membantu bagian pelayanan kepesertaan melayani peserta wajib.
5.	18 Maret 2002	Membantu bagian pelayanan kesehatan merekapitulasi data jiwa triwulan. Membantu mengarsip surat pelayanan klaim.
6.	19 Maret 2002	Membantu bagian pelayanan kepesertaan melayani peserta wajib.
7.	20 Maret 2002	Membantu membuat laporan semester anggaran kapitasi total per jenis pelayanan jenius pelayanan pada Kabupaten Lumajang. Membantu bagian pelayanan kepesertaan melayani peserta wajib.
8.	21 Maret 2002	Membantu melayani peserta mengisi formulir daftar isian peserta ASKES.

9	2 Maret 2002	Membantu membuat laporan semester realisasi kapitasi total per jenis pelayanan. Membantu bagian pelayanan kepesertaan melayani peserta wajib.
10.	25 Maret 2002	Membantu mengentry data peserta wajib. Membantu melayani peserta mengisi formulir daftar isian peserta ASKES. Membantu merevisi laporan semester realisasi kapitasi total per jenis pelayanan.
11.	26 Maret 2002	Membantu bagian pelayanan kepesertaan melayani peserta wajib. Membantu mengentry data peserta wajib.
12.	27 Maret 2002	Membantu merevisi pusat pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jember. Membantu melayani peserta mengisi formulir daftar isian peserta wajib.
13.	28 Maret 2002	Membantu bagian pelayanan kepesertaan melayani peserta wajib. Membantu membuat voucher pelayanan klaim ke Bank BNI.
14.	1 April 2002	Membantu melayani bagian pelayanan kesehatan untuk klaim ke Bank BNI.
15.	2 April 2002	Membantu melayani peserta mengisi formulir daftar isian peserta ASKES. Membantu bagian pelayanan kesehatan melayani klaim perorangan.
16.	3 April 2002	Membantu melayani peserta mengisi formulir daftar isian peserta ASKES. Membantu bagian pelayanan kesehatan melayani klaim

		perorangan.
17.	4 April 2002	Membantu melayani peserta mengisi formulir daftar isian peserta ASKES. Membantu bagian pelayanan kesehatan melayani klaim perorangan.
18.	5 April 2002	Membantu bagian administrasi mengarsip dan mendistribusikan surat masuk. Membantu mengentry data peserta wajib. Membantu bagian keuangan membuat voucher pengeluaran bank dan mengisi kwitansi pengeluaran bank.
19.	8 April 2002	Membantu bagian keuangan membuat voucher pengeluaran kas dan membuat kwitansi kas. Membantu melayani peserta mengisi formulir peserta ASKES.
20.	9 April 2002	Membantu bagian pelayanan kesehatan melayani klaim perorangan. Membantu mengentry data peserta.
21.	10 April 2002	Mendapat penjelasan mengenai tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap.
22.	11 April 2002	Mendapat penjelasan mengenai prosedur pengisian SPT dan SSP. Penetapan PKN.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Luki Yaswati
Nomor Induk Mahasiswa : 990903101013
Alamat : Jl. BANGKA VIII/5 JEMBER.
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Laporan : PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN.....
 PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. (PERSERO)
 ASURANSI KESEHATAN INDONESIA KPC 13-10 JEMBER.

Dosen Pembimbing : Drs. Matnur Haryono

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TID Pembimbing
1.	Rabu, 1 Mei 02	08.00	Konsultasi Bab I	<i>[Signature]</i>
2.	Sabt. 18 Mei 02	08.00	Konsultasi Bab II	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu, 29 Mei 02	08.00	Konsultasi Bab III	<i>[Signature]</i>
4.	Senin, 10 Jun 02	08.00	Konsultasi Bab IV	<i>[Signature]</i>
5.	Kamis, 20 Jun 02	08.00	Acc	<i>[Signature]</i>
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721

PERIHAATAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

TAHUN TAKWIM
20 | 0 | 1

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

DIISI OLEH DIN

A. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 016 0 626 001

1. TGL SPT
DISAMPAIKAN

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA KPC JEMBER

2. STATUS SPT

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. JAWA 55
KOTA/KODE POS : JEMBER

3. N/K/L (F.7)

TELEPON / FAX : 0331-330268

4. LAMPIRAN

D. JENIS USAHA : ASURANSE KESEHATAN

5. KODE
KLU

E. NAMA PIMPINAN : MOHAMMAD TOHA

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI (1)	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN (2)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (3)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp) (4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TU/ATABUNGAN HARI TUA (THT/ JAMINAN HARI TUA (JHT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	9	153600000	4416000
2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/ PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	9	153600000	4416000
3. JUMLAH (1+2)			N I H I L
4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			4416000
5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			NIHEL
6. JUMLAH (4+5)			4416000
7. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL 5/Maret/2002			

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULANTAHUN

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721 - A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

- | | |
|---|---|
| 1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK | 4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT |
| 2. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS | 5. |
| 3. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI | 6. |

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN

KUASA

NAMA TERANG

JEMBER tgl. 29 Maret 20
ASKES
CAB. JEMBER
MOHAMMAD TOHA



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721 - /

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN
ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM

2001

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA KPC 13-10 JEMBER
NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 0016 0 626 0011

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMMAD TOHA	-	1.800.000	55.500
2.	MOENJI SUDJARWO	-	1.600.000	40.000
3.	SUKAMTO	-	1.550.000	43.625
4.	BUDI WUSONADI	-	1.450.000	50.875
5.	GATOT PRAMONO	-	1.450.000	44.875
6.	HARLE PURNOMO	-	1.300.000	31.750
7.	M. KHOIRUL SHOLEH	-	1.300.000	37.750
8.	JUANE KAMARUDIN	-	1.250.000	23.375
9.	RAHMAD JUNALDI	-	1.100.000	40.250

• JUMLAH > - ORANG
- YANG MEMPUNYAI NPWP > - ORANG
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP > - ORANG

368.000

B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP > - ORANG

12.800.000

C. JUMLAH A+B > 9 ORANG

12.800.000

CATATAN:

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721 - A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

2001

A. NOMOR URUT : 01
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA JEMBER
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 016 0 626 001
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. JAWA 55 JEMBER
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : MOHAMMAD TOHA
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : PERUMAHAN GRIYA MANGLI
 H. JABATAN : MANAGER
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ 2 TK/.....
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2001 s.d. DESEMBER 2001
 L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO

1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	1.300.000	
2. TUNJANGAN PPh	2	500.000	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-	
7. JUMLAH (1 S.D. 6)	7	1.800.000	
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	-	
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	1.800.000	

• PENGURANGAN

10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	90.000	
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-	
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	12	-	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	90.000	

• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	1.710.000	
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-	
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	20.520.000	
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	7.200.000	
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	666.000	
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19	-	
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-	
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	55.500	
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	-	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	23	-	
24. JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN..... TELAH <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN.....	24	-	

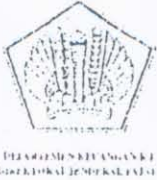
M. PEMOTONG PAJAK
 KUASA

TANDA TANGAN
NAMA TERANG



REG. 29 Maret 2001
CAB. JEMBER

MOHAMMAD TOHA



LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

A. NOMOR URUT : 02
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA JEMBER
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 06711 016 0 626 001
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. JAWA 55 JEMBER
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : MOEDJI SUDJARWO
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : JL. S. PARMAN
 H. JABATAN : ASSISTEN MANAGER
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K. 3 TK/.....
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2001 S.D. DESEMBER 2001
 L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT: (DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO

1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	1.200.000	
2. TUNJANGAN PPh	2	400.000	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-	
7. JUMLAH (1 S.D. 6)	7	1.600.000	
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	-	
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	1.600.000	

• PENGURANGAN

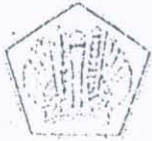
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	80.000	
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-	
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	12	-	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	80.000	

• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	1.520.000	
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-	
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	18.240.000	
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	8.640.000	
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	9.600.000	
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19	480.000	
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-	
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	40.000	
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	-	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a YANG KURANG DIPOTONG (21-22) <input type="checkbox"/> b YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	23	-	
24. JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN.....	24	-	

M. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN
 KUASA NAMA TERANG

JEMBER TGL. 29 Maret 2002
 ASKES
 MOCHAMMAD TOHA



DEPARTEMEN KEUANGAN
KANTOR KEPALA DAERAH

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721 - A

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TERBUKA

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

2001

A. NOMOR URUT : 03
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA JEMBER
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 0116 29 626 001
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. JAWA 55 JEMBER
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : SUKAMTO
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : JL. LETJ. PANJAITAN
 H. JABATAN : ASISTEN MANAGER
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/2 TK/.....
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2001 S.D. DESEMBER 2001

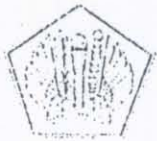
L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEDAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO			
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	1.150.000	
2. TUNJANGAN PPh	2	400.000	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-	
7. JUMLAH (1 S.D. 6)	7	1.550.000	
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	-	
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	1.550.000	
• PENGURANGAN			
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	77.500	
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-	
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	12	-	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	77.500	
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	1.472.500	
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-	
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	17.670.000	
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	7.200.000	
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	10.470.000	
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19	523.500	
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-	
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	43.625	
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	-	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	23	-	
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)			
24. JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN	24	-	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN			

M. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN
 KUASA NAMA TERANG

JEMBER ASKES 29 Maret 2001
 CAB. JEMBER
 MOCHAMMAD TOHA



DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721 - A

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

2 0 0 1

A. NOMOR URUT : 04
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA JEMBER
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 016 10 626 001
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. JAWA 55 JEMBER
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : BUDI WUSONOADI
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : JL. KARIMATA
 H. JABATAN : ASISTEN MANAGER
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K... TK...
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2001 s.d. DESEMBER 2001

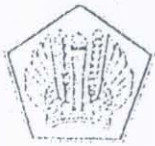
L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	1.100.000
2.	TUNJANGAN PPh	2	350.000
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSII	3	-
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	1.450.000
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	-
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	1.450.000
• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	72.500
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	12	-
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	72.500
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	1.377.500
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	16.530.000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	4.320.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	12.210.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19	610.500
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	50.875
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 20 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	-
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	23	-
24.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TELAAH <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN	24	-

M. PEMOTONG PAJAK KUASA TANDA TANGAN NAMA TERANG

ASKES 29 Maret 2001
 C.A.G. JEMBER
 MOHAMMAD TOHA



BEKAS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721-A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAIWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

2 0 0 1

A. NOMOR URUT : 05
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA JEMBER
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 0116 0 626 001
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. JAWA 55 JEMBER
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : CATOT PRAMONO
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : JL. SUMATRA
 H. JABATAN : ASISTEN MANAGER
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/1 TK/
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2001 s.d. DESEMBER 2001

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	1.100.000
2.	TUNJANGAN PPh	2	350.000
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	1.450.000
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	-
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	1.450.000
• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	72.500
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-
12.	JURAN PENSIUN ATAU JURAN THT/JHT	12	-
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	72.500
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	1.377.500
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	16.530.000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	5.760.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	10.770.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19	538.500
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	44.875
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	-
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	23	-
24.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAIWIM <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAIWIM	24	-

M. PEMOTONG PAJAK
 KUASA

TANDA TANGAN
NAMA TERANG

ASKES 9 Maret 2002
MOHAMMAD TOHA

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721-A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

2 | 0 | 0 | 1

A. NOMOR URUT : 06
B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA JEMBER
C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 016 00 626 001
D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. JAWA 55 JEMBER
E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT : HARIE PURNOMO
F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :
G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT : JL. GAJAH MADA
H. JABATAN : PELAKSANA
I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K 2 TK
K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2001 S.D. DESEMBER 2001
L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO

1. GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	1	1.000.000	
2. TUNJANGAN PPh	2	300.000	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-	
7. JUMLAH (1 S.D. 6)	7		1.300.000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8		-
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9		1.300.000

• PENGURANGAN

10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	65.000	
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-	
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	12	-	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13		65.000

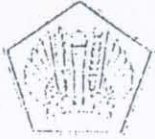
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14		1.235.000
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15		-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16		14.820.000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17		7.200.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18		7.620.000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19		381.000
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20		-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21		31.750
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	22		-
23. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	23		-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	24		-

M. PEMOTONG PAJAK
 KUASA

TANDA TANGAN
NAMA TERANG

ASKES
29 Maret 2002
MOHAMMAD TOHA



UNIVERSITAS JEMBER
Jember

LAMPIRAN A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

2 | 0 | 0 | 1

A. NOMOR URUT : 07
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA JEMBER
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 016 0 626 001
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : J.L. JAWA 55 JEMBER
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : M. KHOIRUL SHOLEH
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : LUMAJANG
 H. JABATAN : PELAKSANA
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/1 TK/
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2001 S.D. DESEMBER 2001

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO					
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	1.000.000		
2.	TUNJANGAN PPh	2	300.000		
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-		
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-		
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-		
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-		
7.	JUMLAH (1 S.D. 6)	7		1.300.000	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8		-	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9		1.300.000	
• PENGURANGAN					
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	65.000		
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-		
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	12	-		
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13		65.000	
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14		1.235.000	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15		-	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16		14.820.000	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17		5.760.000	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18		9.060.000	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19		453.000	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20		-	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21		37.750	
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILIJASI	22		-	
23.	JUMLAH PPh PASAL 21	23		-	
24.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	24		-	
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)					
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN					

ASKES
JEMBER
Maret 2002
MOCHAMMAD TOHA



LAMPIRAN YA
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721 - A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

2001

A. NOMOR URUT : 08
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA JEMBER
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 016 0 626 001
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. JAWA 55 JEMBER
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : JUANI KAMARUDIN
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : PERUMAHAN GRIYA MANGLI
 H. JABATAN : KASIR
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : k3 TK/
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2001 s.d. DESEMBER 2001
 L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

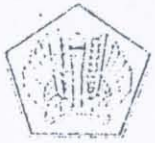
(DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	1.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	2	250.000
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIHAYAR PEMBIERI KERJA	5	-
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	1.250.000
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN TIIR	8	-
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	1.250.000
• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	62.500
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	12	-
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	62.500
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	1.187.500
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	14.250.000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	8.640.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	5.610.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19	280.500
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	23.375
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	-
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	23	-
24.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	24	-

M. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN
 KUASA NAMA TERANG

ASKES 29 Maret 2001
 CAB. JEMBER

MOHAMMAD TOHA



PEJABAT KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUSAHA

LAMPIRAN I A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA (THT)/ JAMINAN HARI TUA (JHT)**

FORMULIR
1721 - A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

2001

A. NOMOR URUT : 09
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA JEMBER
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 061 016 0 626 001
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. JAWA 55 JEMBER
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : RAHMAD JUNAI DI
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : JL. JAWA
 H. JABATAN : PELAKSANA
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/.....
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI 2001 s.d. DESEMBER 2001
 L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO			
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	1	900.000	
2. TUNJANGAN PPh	2	200.000	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-	
5. PREMI ASURANSI YANG DIHAYAR PEMBERI KERJA	5	-	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-	
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7	1.100.000	
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	-	
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	1.100.000	
• PENGURANGAN			
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	55.000	
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-	
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	12	-	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	55.000	
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	1.045.000	
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-	
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	12.540.000	
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	2.880.000	
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18	9.660.000	
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19	483.000	
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-	
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	40.250	
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	-	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) <input checked="" type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	23	-	
24. JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN.....	24	-	

M. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN
 KUASA NAMA TERANG

ASKES
 29 Maret 2001
 MOHAMMAD TOHA



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. ASKES JEMBER
 B. NPWP PEMOTONG PAJAK : 011 0161 0106 01 6126 01011
 C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• <u>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</u>			
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG	-	-	-
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG	-	-	-
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG	-	-	-
4.	KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG	-	-	-
5.	DISTRIBUTOR MLM/DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK ORANG	-	-	-
6.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG	-	-	-
7.	PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG	-	-	-
8.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG	-	-	-
	• <u>PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</u>			
9.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, SEBANYAK ORANG	-	-	-
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG	-	-	-
	• <u>PPh PASAL 26</u>			
11.	PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG	-	-	-
	• <u>PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH</u>			
12.	PENERIMA PENGHASILAN SAMPAI DENGAN SEBESAR UMP/UMK, SEBANYAK ORANG	-	-	-
13.	JUMLAH 1 S.D. 11 : ORANG			

CATATAN :

PINDAHKAN ANGKA 13 (JUMLAH 1 S.D. 11 ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);
 PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
 PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip WP

PWP : - - - - diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA KPC 13-10 JEMBER

Alamat WP : JL. JAWA 55 JEMBER

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal 21

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Empat juta empat ratus enam belas
ribu rupiah.

4.416.000,-

Tempat Teraan

Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JEMBER, tgl. 24 Maret 2002

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : Mochammad Toha

Nama Jelas :

Uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

bahan Informasi :

husus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

husus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

